

---

## Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai

### *Efficiency and Effectiveness of Regional Original Revenue of Banggai Regency*

**Irwan Moridu**

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai,  
Indonesia

(\*)Email Korespondensi: [irwanmoridu@gmail.com](mailto:irwanmoridu@gmail.com)

---

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi dan efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banggai, data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas PAD. Berdasarkan hasil penelitian, Selama kurun waktu 2015 – 2018 Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai dalam kategori yang sangat efisien dengan tingkat efisiensi adalah masing – masing sebesar 0,43%, 0,37%, 0,49% dan 0,35%. Sedangkan untuk Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 dalam kategori sangat efektif dengan nilai 105,20%, tahun 2016 dan 2017 dengan kategori cukup efektif dengan nilai 96,61% dan 95,95% sedangkan tahun 2018 kategori kurang efektif dengan nilai 77,31%.

**Kata kunci:** Efisiensi, Efektivitas, PAD

---

#### **Abstract**

*The purpose of the study was to determine and analyze the efficiency and effectiveness of the reception of Original Local Revenue in Banggai Regency, the data were analyzed descriptively quantitatively using the ratio of efficiency and effectiveness of PAD. Based on the results of the study, during the period of 2015 - 2018 the efficiency of the Original Revenue of the District of Banggai in the category of very efficient with the level of efficiency was respectively 0.43%, 0.37%, 0.49% and 0.35%. As for the Effectiveness of Regional Original Revenue in 2015 in the very effective category with a value of 105.20%, in 2016 and 2017 with a category quite effective with a value of 96.61% and 95.95% while in 2018 the category is less effective with a value of 77.31%.*

**Keywords:** Efficiency, Effectiveness, PAD

---

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Pendapatan daerah diklasifikasikan dalam dua sumber pokok yaitu pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat seperti pajak negara, bea cukai, ganjaran, subsidi dan sumbangan negara. Pendapatan Daerah sangatlah penting untuk dikelola dengan baik karena merupakan sumber daya keuangan untuk kegiatan otonomi daerah. Untuk beberapa urusan dalam pemerintahan yang awalnya merupakan sentralistis kini telah menjadi pemerintah yang harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Yang kemudian hal ini didasari oleh semakin banyak kebutuhan dari persoalan masyarakat yang kemudian kebutuhan desentralisasi yang semakin diperlukan. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya. Sumber dari pendapatan daerah berasal dari bantuan pemerintah pusat dan dapat diberikan kepada daerah.

Pemerintah daerah seharusnya bisa memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di punggut dari masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya menjadi perhatian pihak eksekutif, namun legislatif pun berkepentingan sebab besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi struktur anggaran dewan (Mahmudi, 2010).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Bastian dalam (Miragustia Mayza, 2015) penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah gabungan dari beberapa pos Pajak yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerimaan Non Pajak yang ada dari hasil perusahaan milik daerah, serta pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dimana ada kekhawatiran apabila daerah mempunyai

sumber – sumber keuangan yang besar akan menyebabkan terjadinya di sintegrasi dan separatisme dalam suatu daerah (Nasir, 2019). Menurut Samsubar Saleh dalam (Kamila, 2016) Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini.

Menurut (Halim, 2012), Pendapatan Asli Daerah adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Selanjutnya Menurut (Halim, 2012) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi.

Menurut (Siahaan, 2009) Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh (Keintjem et al., 2021) yang menyatakan bahwa kontribusi dari pajak daerah yang merupakan bagian dari PAD adalah sangat baik, sedangkan penelitian dari (Pandelaki et al., 2021) menyebutkan bahwa kontribusi pajak adalah sedang. Disamping pajak daerah ada retribusi yang merupakan penyumbang PAD yang cukup besar.

Menurut (Munawir, 2010) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Penelitian yang diperoleh dari (Komara et al., 2019),(Kartika et al., 2021) menyatakan

bahwa kontribusi dari retribusi sangat berfluktuasi dalam peningkatan PAD.

Kabupaten Banggai merupakan salah satu wilayah administrasi dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai mempunyai laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banggai fluktuatif dari data BPS Kabupaten Banggai. Sudah seharusnya Kabupaten Banggai mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Widjaja dalam (Aji Bayu Purnomo., Kirya I Ketut., 2015) Pendapatan Asli Daerah

adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah dan merupakan bagian modal dasar dari pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai pada tahun anggaran 2014 – 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 - 2018**

No	Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
1	2015	106.833.043.842,00	112.387.822.982,13
2	2016	140.000.000.000,00	135.255.638.703,43
3	2017	194.566.007.852,00	186.690.738.617,03
4	2018	164.385.345.232,23	127.096.022.732,53

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan PAD Kab. Banggai, 2019

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai terus mengalami peningkatan pada Tahun 2015 - 2018 kemudian di Tahun 2018 mengalami penurunan. Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak sepenuhnya tercapai dan pagu anggaran untuk menarik Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidak terlalu besar. Sehingga perlu ada penelitian lanjut untuk mengetahui penyebab dari penurunan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai.

## METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kuantitatif. Untuk Menganalisis tingkat efisiensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan formula perhitungannya adalah biaya yang di keluarkan untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah,

dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Menurut (Mahmudi, 2010) kriteria penilaian efisiensi pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100$$

Dalam menganalisis tingkat efektifitas dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai maka di perlukan data realisasi penerimaan dan target penerimaan. Dimana semakin besar presentase yang di capai maka semakin tinggi tingkat efektifitas pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai (Mahmudi, 2010):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

## HASIL

Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 2015 hingga tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2015 – 2018**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	106.833.043.842,00	112.387.822.982,13
2016	140.000.000.000,00	135.255.638.703,43
2017	194.566.007.852,00	186.690.738.617,03
2018	164.385.345.232,23	127.096.022.732,53

Sumber : Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Banggai, 2019

**Tabel 3. Biaya Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2015 – 2018**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	543.736.000,00	543.736.000,00
2016	504.122.700,00	504.122.700,00
2017	986.475.000,00	925.600.500,00
2018	446.159.000,00	443.176.500,00

Sumber : Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Banggai, 2019

Berdasarkan data diatas penulis menganalisis lebih lanjut dalam rasio efisiensi dan efektivitas Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Banggai selama kurun waktu 2015 – 2018 sebagai berikut:

#### Rasio Efisiensi PAD

**Tabel 4. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2015 – 2018**

Tahun	Biaya pemungutan PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efisiensi	Kategori
2015	543.736.000,00	112.387.822.982,13	0,43%	Sangat Efisien
2016	504.122.700,00	135.255.638.703,43	0,37%	Sangat Efisien
2017	925.600.500,00	186.690.738.617,03	0,49%	Sangat Efisien
2018	443.176.500,00	127.096.022.732,53	0,35%	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah, 2019

#### Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2015 – 2018**

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Rasio Efektivitas	Kategori
2015	112.387.822.982,13	106.833.043.842,00	105,20%	Sangat Efektif
2016	135.255.638.703,43	140.000.000.000,00	96,61%	Cukup Efektif
2017	186.690.738.617,03	194.566.007.852,00	95,95%	Cukup Efektif
2018	127.096.022.732,53	164.385.345.232,23	77,31%	Kurang Efektif

Sumber : Data Diolah, 2019

### PEMBAHASAN

#### Efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 - 2018

Efisiensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banggai dari tahun anggaran 2015 sampai tahun

anggaran 2018 di Kabupaten Banggai mengalami peningkatan dan penurunan atau selalu berfluktuasi. Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 perkembangan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan, pencapaian Pendapatan Asli Daerah

2015 cukup baik dibandingkan dengan tahun 2018 yang mengalami penurunan rasio tetapi masih kategori sangat efisien, penurunan ini sejalan dengan penelitian dari (Wijayanti & W, 2020)

Ditinjau dari efisiensi Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun pada dasarnya mengalami kenaikan maupun penurunan. Perubahan efisiensi Pendapatan Asli Daerah selalu berfluktuasi setiap tahunnya dikarenakan selalu meningkatnya target pada setiap tahunnya dimana pagu anggaran dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah juga mengalami perubahan yang meningkat dan berfluktuasi, hal ini dapat dilihat untuk tahun anggaran 2015 ke tahun anggaran 2017 Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banggai naik menjadi lebih baik yaitu mencapai Rp186.690.738.617,03,- dari total penerimaan dari tahun sebelumnya dengan pagu anggaran pemungutan sebesar Rp.925.600.500,- Pertumbuhan dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banggai terus dikembangkan, hal ini dapat kita lihat dengan adanya penambahan armada dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banggai yang disediakan Pemerintah sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan retribusi dapat meningkat. Biaya yang dipungut dari masyarakat berupa pajak dan retribusi ini selain dipergunakan untuk membiayai pemeliharaan sarana dan prasarana, juga dialokasikan untuk menutupi kekurangan PAD Kabupaten Banggai, sehingga pendapatan daerah dapat meningkat.

Secara umum efisiensi pemungutan pajak daerah menunjukkan tingkat rata-rata efisiensi sebesar 5%. Dengan demikian, berdasarkan kriteria baik yang diungkapkan Goode dan Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2002 tentang biaya pemungutan yang paling tinggi 5%. Efisiensi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Banggai dapat dikatakan efisien. Efisien Pemungutan pajak daerah ini dikarenakan adanya pengaruh sentral berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2002. Dengan demikian setiap daerah mampu memberikan biaya upah pungut sesuai dengan batas

kemampuannya tidak melampaui batasan setinggi-tingginya yakni sebesar 5%. Walaupun dalam konteks penetapannya di Kabupaten Banggai menghitung untuk biaya upah pungut itu dikumulatifkan dalam suatu pajak maupun retribusi semua Kecamatan, artinya tidak dihitung berdasarkan perkomponen pajak daerah, karena hal ini dilakukan bersifat untuk menyeimbangkan target dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah. Bahwa untuk melihat gambaran proporsi biaya upah pungut dari masing-masing komponen PAD dapat dilihat dengan memilah komponen PAD tersebut kemudian dihitung berdasarkan biaya pemungutannya yakni paling tinggi sebesar 5% dari jumlah realisasinya. Menurut pernyataan Widodo (dalam Abdul Halim, 2012:286) meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan daerah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan tersebut kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterima.

### **Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 - 2018**

Penurunan efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banggai dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Penurunan efektifitas ini terjadi kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak maupun retribusi serta komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya, penurunan ini sangat berdampak kepada tingkat pertumbuhan maupun efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banggai. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang masih dalam ketagori cukup efektif dan kurang efektif disebabkan kesadaran masyarakat akan wajib pajak dan retribusi masih kurang, oleh karena itu perlu diadakan sosialisasi dari pemerintah sehingga pertumbuhan dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banggai dapat berjalan maksimal, berbeda halnya dengan penelitian (Wijayanti & W, 2020) dimana hasil yang didapatkan adalah sangat efektif dimana hasil yang didapatkan lebih dari 100% dimana ini menunjukkan hasil kerja pemerintah cukup baik,

sedangkan hasil dari (Pandelaki et al., 2021) adalah sedang walaupun cenderung mengalami peningkatan tetapi untuk kontribusi terhadap PAD justru masih mengalami penurunan.

Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banggai belum melampaui target yang di tetapkan, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum cukup efektif untuk mengelola keuangan daerahnya terutama pada sisi penerimaan daerah dapat menghitung kembali dengan lebih akurat mengenai potensi-potensi penerimaan daerahnya. Karena kemungkinan selama ini target yang ditetapkan masih belum optimal. Apabila dilihat dari tahun 2015 kategori sangat efektif hal ini sesuai dengan penelitian (Pratama et al., 2019) dimana hasilnya juga sangat efektif sama halnya dengan (Julastiana, 2012) yang tergolong sangat efektif.

Usaha- usaha pemerintah Kabupaten Banggai dalam upaya peningkatan PAD antara lain dengan program intensifikasi merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mendayagunakan potensi sumber - sumber PAD pemerintah daerah secara optimal dan Pemerintah di harapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemungutannya (Martini., Rita., Resy Agustin., Zaliah Zaliah., 2019) Aktualisasi upaya intensifikasi untuk peningkatan PAD secara kongkrit mencakup: a) Peningkatan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pungutan b) Peningkatan Penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan akan dilaksanakan dalam dua metode yaitu: 1) Penyuluhan yang dilakukan pada saat kegiatan pendataan dan penagihan di lapangan, dengan demikian wajib pajak/wajib retribusi akan mengerti tentang hak dan kewajibannya. 2) Penyuluhan dalam bentuk selebaran dan brosur-brosur tentang jenis retribusi daerah yang menjadi kewajiban wajib pajak/wajib retribusi dalam Daerah Kabupaten Banggai serta manfaatnya dalam pembangunan. 3) Meningkatkan operasional di lapangan. 4) Meningkatkan koordinasi 5) Mengkaji penyesuaian peraturan pemerintah tentang pendapatan daerah. 6) Memberikan

sanksi/denda terhadap wajib pajak dan retribusi daerah yang terlambat membayar kewajibannya.

Sebagai usaha dalam meningkatkan PAD Kabupaten Banggai ditempuh melalui kegiatan ekstensifikasi PAD yakni upaya meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali sumber-sumber PAD yang baru, seperti: 1) Mempelajari kemungkinan penetapan jenis pajak atau retribusi daerah yang baru pada retribusi jasa usaha laundry, retribusi jasa usaha pengolahan limbah, retribusi usaha kecil menengah, rumah makan menengah dan kafe-kafe atau warung kopi dan lain- lain. 2) Mempelajari kemungkinan penetapan jenis pajak atau retribusi daerah yang baru bagi pemakai antena parabola. 3) Mempelajari kemungkinan penetapan jenis pajak atau retribusi daerah yang baru bagi setiap produk yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa selama kurun waktu 2015 – 2018 Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai dalam kategori yang sangat efisien dengan tingkat efisiensi adalah masing – masing sebesar 0,43%, 0,37%, 0,49% dan 0,35%. Sedangkan untuk Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 dalam kategori sangat efektif dengan nilai 105,20%, tahun 2016 dan 2017 dengan kategori cukup efektif dengan nilai 96,61% dan 95,95% sedangkan tahun 2018 kategori kurang efektif dengan nilai 77,31%.

### **SARAN**

Rekomendasi saran perlu melakukan pengkajian ulang terhadap sumber-sumber pajak dan retribusi yang baru berkembang dan sedang berkembang di Kabupaten Banggai seperti showroom mobil, usaha jasa laundry, percetakan, warung kopi, terminal, dan lain-lain yang sudah mempunyai keuntungan yang sesuai untuk menjadi wajib pajak maupun wajib retribusi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Aji Bayu Purnomo., Kirya I Ketut., S. G. P. A. J. (2015). Analisis Sumber

- Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 95–104.
- Dewi Sartika., Atika Ulfa., A. I. (2017). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 19(1), 113–126.
- Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. In *Salemba Empat*. <https://doi.org/ISBN:978-979-061-226-6>
- Handika Rizka Ari Wibowo., Suharno., D. K. (2017). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Retribusi Pariwisata Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013-2017 (Studi Kasus Pada Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur Wonogiri). *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 15(1), 31–38.
- Julastiana, yaneka. (2012). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–17.
- Kamila, A. (2016). Pengaruh Sektor Pariwisata, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Investasi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2010-2014 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Eks Karisidenan Surakarta). *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. <https://doi.org/10.5151/cidi2017-060>
- Kartika, S. E., Sutaningsih, S., & Widowati, W. (2021). Analisis Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.411>
- Keintjem, N., Engka, D. S. M., & Walewangko, E. N. (2021). TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( Studi Empiris Di Kota Manado ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 36–45.
- Komara, M., Peirisal, T., Studi, P., Publik, A., Subang, U., & Subang, K. (2019). *Analisis pendapatan asli daerah kabupaten subang tahun 2017 -2019*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Martini., Rita., Resy Agustin., Zaliah Zaliah., H. W. (2019). Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan : Dari Kontribusi Retribusi Pasar. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 5(1), 58–71.
- Miragustia Mayza, R. M. M. N. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 74–86.
- Munawir. (2010). Analisa Laporan Keuangan Edisi 4. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Pandelaki, J. R., Engka, D. S. M., Pingkan, I., & Rorong, F. (2021). KABUPATEN MINAHASA TENGGARA ( STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Berdasarkan Undang-Undang D. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 14–34.
- Prasetya, F. A., Rajindra, R., & Sirajudin, S. (2018). ANALISIS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DONGGALA. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1).
- Pratama, D. A., Paramita, R. W. D., & Taufiq, M. (2019). Analisis Efektivitas

- , Efisiensi , Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang. *Progress Conference*, 2(July), 1–8.
- Rahman, A., Rajindra, R., & Mayangsari, N. S. (2020). ANALISIS EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH. *Jurnal Sinar Manajemen*, 7(1), 34–41.
- Rajindra, Rajindra, Guasmin, G., & Burhanuddin, B. (2020). Financial Performance Analysis of Shares Returns in Cosmetics and Household Purposes Companies (Studies on companies listed on the Indonesian Stock Exchange). *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 2(4), 196–204.
- Siahaan, M. P. (2009). Pajak daerah. *Jurnal Pajak Daerah*.
- Wijayanti, I., & W, K. Z. (2020). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Melalui Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Pajak Air Tanah. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(10), 42–56.